

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Presiden Soekarno dan Wakilnya, Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Terhitung sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, akan tetapi Indonesia masih menghadapi permasalahan yang sama sejak merdeka yaitu masalah integrasi sosial. Di mana integrasi sosial sendiri diartikan sebagai prosedur untuk menyesuaikan komponen yang berbeda menjadi satu kesatuan dalam masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena ciri khusus Indonesia sebagai negara heterogen yang menimbulkan berbagai permasalahan mengenai pembangunan bangsa dan negara, selain itu ditambah dengan faktor kemiskinan dan kerumitan hubungan antara masyarakat dan negara mempersulit penyelesaian kasus ini (Fisip.ui.ac.id, 2024). Negara sebagai aktor penting dalam masalah ini harus dapat mewakili dan memenuhi kepentingan masyarakatnya masing-masing.

Adapun masalah integrasi sosial yang masih belum terselesaikan dari zaman kemerdekaan Indonesia hingga sekarang yaitu mengenai Papua. Papua atau sebelumnya bernama Irian Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian ujung timur Indonesia. Papua kaya akan sumber daya alam, tanahnya yang luas dipenuhi oleh hutan, laut dan keaneka ragaman biotanya. Papua juga terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa daerah sehingga

menghasilkan berbagai budaya dan kesenian yang menjadi ciri khas Papua. Papua menjadi bagian Indonesia sejak tanggal 19 November 1969 sesuai dengan hasil dari Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) (Sucahyo, 2022). Masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui proses yang panjang dimulai dari terlaksananya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada tahun 1949 dengan hasil bahwa Indonesia diakui kemerdekaannya oleh Belanda (Adryamarthanino & Nailufar, 2021).

Kemudian proses penundaan selama satu tahun setelah pengakuan kedaulatan mengenai Papua. Belanda yang ingkar janji selama setahun kemudian. Trikora (Tri Komando Rakyat) yang dikeluarkan pada tahun 1961 sebagai bentuk penolakan terhadap proklamasi kemerdekaan Papua. Hingga berlanjut dengan tercapainya *New York Agreement* tahun 1962 yang merupakan perjanjian untuk mengatur pemindahan kekuasaan atas Papua dari Belanda ke Indonesia, dan terlaksananya Pepera pada tahun 1969 (Mulyadi, Prakoso, & Mudhio, 2021). Setelah masuknya Papua menjadi bagian dari Indonesia, harusnya proses tersebut diteruskan dengan proses integrasi sosial yakni dengan memastikan masyarakat Papua dari Sorong sampai Merauke merasa menjadi bagian dari Indonesia (Fisip.ui.ac.id, 2024).

Integrasi sosial ini dilakukan oleh Indonesia, akan tetapi pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia malah membuat integrasi sosial masyarakat Papua makin rapuh. Hal ini seperti Indonesia yang melakukan pendekatan dengan melakukan program transmigrasi (Theconversation.com, 2019). Masyarakat Papua berpikir bahwa dengan banyaknya pendatang dari luar

Papua menimbulkan perasaan luas bahwa masyarakat Papua dipinggirkan. Tidak cukup rasa perbedaan yang terus dirasakan masyarakat Papua dengan masyarakat Indonesia, mereka merasa kembali terpinggirkan dengan adanya transformasi demografi tersebut (Chauvel, 2005). Selain itu, program ini justru memunculkan berbagai persoalan seperti malnutrisi, deforestasi, dan lain sebagainya (Theconversation.com, 2019). Kemudian, adanya kegagalan pembangunan dan diberlakukannya kebijakan desentralisasi yaitu membagi kewenangan politik antara pusat dan daerah menjadi salah dua kegagalan pendekatan Indonesia ke Papua (Chauvel, 2005). Masyarakat Papua menganggap bahwa pemerintah tidak dapat mengelola sumber daya alam yang melimpah di Papua karena mereka masih hidup miskin. Kurangnya kejelasan dari Pemerintah kepada masyarakat Papua mengenai bagaimana Papua diintegrasikan ke Indonesia menjadikan banyak masyarakat Papua merasa kecewa (Chauvel, 2005). Hal ini menjadi salah tiga gagalnya pendekatan Indonesia ke Papua. Selain itu, adanya persaingan sengit yang dirasakan elit Papua dengan para pejabat Indonesia dari luar Papua yang terjadi sejak masa kolonial Belanda dan adanya tindak koersif oleh aparat keamanan juga menjadi faktor kegagalan Indonesia dalam melakukan pendekatan ke Papua (Chauvel, 2005).

Adapun tindak koersif yang dilakukan oleh aparat keamanan ini dilakukan sebagai upaya meneguhkan kedaulatan teritorial (Theconversation.com, 2019). Namun, banyaknya permasalahan antara Indonesia dengan Papua ini dapat menjadikan turunnya citra Indonesia di mata

publik, dan hal ini juga membuat beberapa negara Pasifik Selatan yang juga menjadi negara anggota MSG mengkritik Indonesia. *Melanesian Spearhead Group* (MSG) merupakan organisasi regional yang anggotanya berasal dari negara dengan latar belakang budaya yang sama yaitu Melanesia. Negara-Negara dengan budaya Melanesia memiliki mayoritas penduduk ber-etnis melanosoid dan bertempat di kawasan Pasifik. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1988 dan diresmikan menjadi organisasi sub-regional pada tanggal 23 Maret 2007 melalui *Agreement Establishing the Melanesian Spearhead* (Kemlu.RI, 2022)

Adapun negara-negara yang menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yaitu Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Front de Liberation Nationale Kanak Et Socialiste (FLNKS) yang merupakan salah satu partai pro populasi melanesia di Kaledonia baru (Kemlu.RI, 2022). Negara-negara anggota MSG ini menerima keanggotaan ULMWP (*United Liberation Movement for West Papua*) di tahun 2015 sebagai anggota pengamat atau observer member dengan catatan sebagai wakil penduduk Indonesia yang tinggal diluar wilayah Indonesia dan bukan sebagai entitas negara sendiri (Momou, 2017). Hal ini dilakukan oleh negara-negara anggota MSG sebagai salah satu cara agar mereka (Papua) dapat menyuarakan isu-isu HAM yang selama ini telah diperjuangkan (Momou, 2017). Negara-negara anggota MSG merasa bahwa mereka memiliki kesamaan ras dengan Papua yaitu ras Melanesia dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

dari ras Melanesia yang berada di Asia pasifik (Angeli & Karisoh, 2022). Oleh karena itu, mereka berupaya menolong saudara mereka dari penjajah.

Selain memberikan dukungannya terhadap ULMWP, negara-negara anggota MSG seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan lain sebagainya mengkritik Indonesia atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Hal ini dilakukan pada sidang PBB tahun 2016 (Angeli & Karisoh, 2022). Negara-negara anggota MSG menuntut Indonesia untuk memberikan kebebasan kepada Papua dalam mendirikan negara sendiri (Angeli & Karisoh, 2022). Kritik yang diberikan kepada Indonesia ini tidak hanya dilakukan di tahun 2016 saja, akan tetapi lima tahun setelahnya kritik ini tetap disampaikan dalam sidang PBB oleh negara-negara tersebut. Sebelum negara-negara MSG memberikan kritik dalam sidang PBB, di tahun 2014 Vanuatu sebagai negara anggota MSG mendesak PBB untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia terhadap Papua. Pernyataan ini memicu tindakan 2 wartawan asal Perancis untuk datang ke Papua dan diduga melakukan aktivitas jurnalistik. Kedua wartawan ini menyalahi izin tinggal karena visa yang mereka gunakan adalah visa turis (News.detik.com, 2015). Hal ini tentunya memantik respon Indonesia, sehingga pemerintah menyampaikan informasi yang sebenarnya melalui portal berita yang ditayangkan di tahun 2015 dan 2016.

Adanya kritikan kepada Indonesia dan dukungan yang diberikan oleh MSG kepada Gerakan Papua Merdeka ini mengancam kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mengajukan diri untuk menjadi anggota MSG.

Adapun Indonesia masuk menjadi *Associate Member* (AM) pada tahun 2015 ketika diselenggarakan *20th MSG Leaders' Summit* di Honiara, Kepulauan Solomon (Kemlu.RI, 2022). Sebelumnya, Indonesia menjadi *observer* di organisasi MSG sejak tahun 2011 ketika diadakannya *18th MSG Leaders Summit* di Fiji. Di tahun yang sama, yakni tahun 2011 upaya lain yang dilakukan oleh Indonesia selain menjadi *observer* di organisasi MSG adalah mengadakan kerja sama teknik 2011-2014. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan negara-negara anggota MSG (Angeli & Karisoh, 2022). Selain upaya tersebut, Indonesia juga memerlukan berbagai upaya lain untuk memperbaiki persepsi negara-negara anggota MSG. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai “Bagaimana upaya Indonesia dalam melakukan diplomasi publik ke negara-negara MSG pada tahun 2011-2016”.

Jika dianalisis lebih mendalam, terdapat beberapa literatur yang relevan dengan pembahasan diplomasi publik salah satunya yaitu jurnal berjudul “Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua” (Sabir, 2018). Jurnal ini berupaya membuktikan berhasil tidaknya diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Vanuatu sebagai upaya membatasi pergerakan separatisme papua. Adapun hasil dari pembahasan penelitian ini memperlihatkan bahwa upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia untuk mempengaruhi tindakan Vanuatu atas gerakan separatisme Papua belum berhasil dilakukan, hal ini karena kurang maksimalnya penerapan diplomasi publik Indonesia. Hal

ini dibuktikan dengan Vanuatu yang masih mendukung separatis Papua. Dalam jurnal ini, peneliti mengemukakan penyebab gagalnya diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu yaitu aktor negara lebih mendominasi pelaksanaan diplomasi publik dibanding dengan aktor non-negara, kurang optimalnya pelaksanaan diplomasi publik, dan kerasnya pengaruh doktrin *Melanesian Renaissance* dalam politik Vanuatu. Terdapat persamaan penelitian yaitu menggunakan teori yang sama, diplomasi publik oleh *Leonard, Stead, dan Smewing*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada diplomasi publik Indonesia dengan Vanuatu sedangkan penelitian ini berfokus pada diplomasi publik Indonesia dengan MSG di tahun 2014-2016.

Jurnal berikutnya yaitu “Diplomasi Soft Power Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group* terhadap *United Liberation Movement for West Papua*” dimana jurnal ini membahas mengenai cara Indonesia dalam mempengaruhi negara anggota MSG dengan soft power (Roziqi, 2020). Dalam hal ini, kepentingan Indonesia adalah membatasi berkembangnya ULMWP di Melanesia dan mencegah ULMWP agar tidak menjadi anggota MSG. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia berupaya melakukan soft power terhadap negara MSG melalui budaya seperti mengadakan festival budaya Melanesia di Kupang, NTT. Seniman dari Indonesia khususnya dari Provinsi Papua dan Papua Barat untuk berpartisipasi dalam *Melanesian Arts and Cultural Festival* (MACFest) yang diadakan di Honiara, Kepulauan Solomon pada tahun 2018, membentuk program baru yaitu BSBI (Beasiswa

Seni dan Budaya Indonesia) dimana program ini mengundang peserta dari berbagai negara untuk berkumpul dan mempelajari budaya Indonesia, dan lain sebagainya. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni membahas mengenai *Melanesian Spearhead Group*, akan tetapi juga terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu teori atau konsep yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi publik, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan konsep diplomasi soft power.

Jurnal selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul “*Balinale Public Diplomacy Through Bali International Film Festival Towards Foreign Tourists*” yang membahas mengenai diplomasi publik Balinale terhadap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia (Habibullah, Chandra, & Teuku, 2022). Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara realita dan teori yang berkaitan dengan salah satu instrumen aktivitas diplomasi publik yaitu festival film internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktiknya, terdapat perbedaan fungsi antara festival film sebagai sebuah kesenian dan instrumen untuk mencapai kepentingan negara. Dampak dari perbedaan fungsi ini adalah peran balinale sebagai instrumen diplomasi publik Indonesia tidak berjalan dengan maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan suatu upaya yang terintegrasi untuk membangun hubungan antara balinale dengan pemerintah. Adapun dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan yang signifikan yakni mengenai topik pembahasan. Peneliti berfokus



membahas mengenai upaya diplomasi publik Indonesia terhadap MSG, akan tetapi jurnal penelitian terdahulu membahas mengenai diplomasi publik antara lembaga non-pemerintahan (balinale) dengan wisatawan mancanegara.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai diplomasi publik. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas mengenai upaya Indonesia dalam melakukan diplomasi publik ke negara-negara MSG pada tahun 2011-2016. Peneliti melakukan analisis upaya diplomasi publik menggunakan teori diplomasi publik dari Leonard, Stead, dan Conrad. Dimana Leonard, Stead, dan Conrad membagi proses keberlangsungan diplomasi publik menjadi tiga komponen. Hal ini berbeda dengan jurnal sebelumnya karena jurnal sebelumnya belum pernah menggunakan teori tersebut dalam pembahasan mengenai upaya diplomasi publik antara Indonesia dengan negara-negara anggota MSG. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terkait upaya Indonesia dalam melakukan diplomasi publik ke negara-negara MSG pada tahun 2011-2016.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis memfokuskan masalah yang diteliti yaitu “Bagaimana upaya Indonesia dalam melakukan diplomasi publik ke negara-negara MSG pada tahun 2011-2016”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi baru kepada peneliti dan masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah atau penelitian ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas dalam prodi Hubungan Internasional yakni tugas akhir Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

#### **1.3.2 Secara Khusus**

Secara khusus, tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Diplomasi Publik yang dilakukan oleh Indonesia ke negara-negara MSG pada tahun 2011 hingga 2016. Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi bagi para peneliti yang tertarik dengan studi wacana ini.

### **1.4 Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1 Diplomasi Publik**

Istilah diplomasi publik pertama kali digunakan di tahun 1965 oleh *Dean Edmund Gullion* bersamaan dengan didirikannya *the Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy di Fletcher* (Anwar, 2008). Pada masa tersebut, diplomasi publik erat kaitannya dengan pengaruh sikap publik untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Menurut *Edward R. Murrow* diplomasi publik berbeda dengan diplomasi tradisional, diplomasi

publik tidak hanya melibatkan interaksi dengan pemerintah akan tetapi interaksi juga dilakukan kepada individu dan organisasi non pemerintah (Leonard, Stead, & Conrad, 2002). Sedangkan diplomasi internasional dijalankan oleh para diplomat yang merupakan wakil resmi negaranya dan berhubungan dengan negara lain dan lebih banyak interaksi dengan pemerintah.

Tujuan utama dari diplomasi publik sendiri yaitu berupaya mempengaruhi masyarakat luar agar berpandangan positif terhadap negara yang menjalankan diplomasi publik tersebut (Anwar, 2008). Dengan banyaknya pandangan positif ini maka secara tidak langsung dapat membantu kelancaran pelaksanaan kebijakan luar negeri tersebut secara keseluruhan. Terkadang, hubungan antar negara dapat dipengaruhi oleh sikap publik terhadap negara tersebut misal terdapat dua negara yang memiliki hubungan diplomatik yang baik. Akan tetapi, ketika sikap masyarakat salah satu negara tidak mendukung maka hubungan antar kedua negara tersebut dapat terganggu atau bahkan berjalan dengan tidak baik.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan pelaksanaan hubungan diplomatik dalam lingkungan yang semakin kompleks. Adapun kegiatan diplomasi publik ini bersifat terbuka, dengan objek yang lebih luas serta aktor yang tidak terbatas (Anwar, 2008). Sebelum masuknya era globalisasi, interaksi internasional hanya dilakukan oleh kalangan terbatas seperti aktor-aktor pemerintah dan kalangan bisnis, akan tetapi setelah masuknya era

gobalisasi banyak aktor-aktor non-pemerintah yang semakin banyak terlibat seperti LSM, media massa, intelektual, dan lain sebagainya. Aktor-aktor non-pemerintah ini terlibat tidak hanya dalam interaksi internasional saja, akan tetapi mereka juga banyak terlibat dalam perumus kebijakan luar negeri.

Menurut Leonard (2002) diplomasi publik mendefinisikan citra dan reputasi suatu negara sebagai barang publik yang dapat mempengaruhi kepentingan individu akan tetapi, citra dan reputasi tersebut dipengaruhi oleh kemampuan suatu negara dalam menanggapi isu-isu tertentu (Leonard, Stead, & Conrad, 2002). Misal suatu negara mendapat banyak keuntungan dari penjualan produk asal negara tersebut hal ini dipengaruhi oleh bagaimana negara tersebut dapat menjual produk-produk tersebut dengan baik seperti mempublikasikan nilai budaya dari produk tersebut atau lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa definisi diplomasi publik menurut Leonard (2002) adalah upaya negara dalam menciptakan atau mempertahankan reputasinya dalam membangun hubungan dengan negara lain untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut (Leonard, Stead, & Conrad, 2002).

Leonard (2002) berpendapat bahwa lembaga non pemerintah memiliki kelebihan dalam menjadi instrumen diplomasi publik, hal ini karena publik memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lembaga non pemerintah dibanding dengan lembaga resmi pemerintah (Leonard, Stead, & Conrad, 2002). Untuk mengatasi kurangnya kepercayaan publik, lembaga resmi pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga non pemerintah yang

memiliki tujuan yang sama sehingga dapat menambah tingkat kepercayaan publik. Jika tingkat kepercayaan publik meningkat maka masyarakat akan memberikan apresiasi tinggi kepada negara tersebut. Adapun untuk mencapai tujuan ini, diplomasi publik tidak dapat menjadi proses penyampaian pesan yang hanya bersifat satu dimensi.

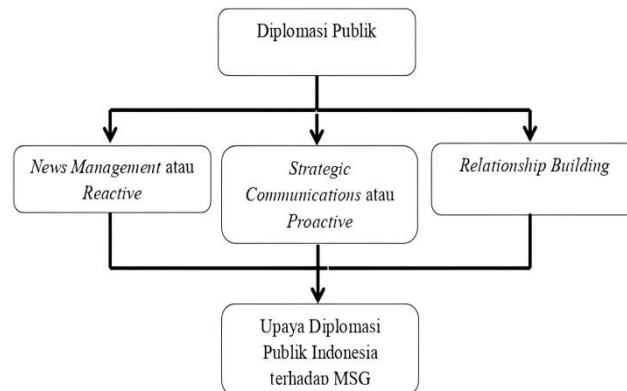
Leonard membagi proses diplomasi publik ke dalam tiga bentuk diplomasi, yaitu *News Management* atau *Reactive* yaitu suatu aktivitas yang dilakukan untuk menanggapi suatu isu melalui cara yang sesuai dengan tujuan strategis negara tersebut misalnya menyampaikan informasi dan pemberitahuan dalam jangka waktu hitungan jam atau hari terkait isu tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui tv, radio, dan media cetak. Aktor-aktor diplomasi baik aktor non-pemerintah, aktor pemerintah, media masa, dan lain sebagainya turut serta dalam komponen ini.

Kemudian, *Strategic Communications* atau *Proactive* yaitu suatu aktivitas yang dilakukan secara proaktif dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi publik asing. Adapun aktivitas ini dapat dilakukan dengan membuat agenda berita atau peristiwa untuk memperkuat pesan inti (Leonard, Stead, & Conrad, 2002). Komponen yang terakhir, *Relationship Building* yakni suatu aktivitas membangun hubungan jangka panjang dengan publik asing untuk menyebarkan nilai dan kepentingan negara. Hal ini dapat dilakukan melalui beasiswa, pertukaran, pelatihan, seminar, konferensi, membangun jaringan secara virtual maupun nyata, dan memberikan masyarakat akses ke saluran media. Membangun hubungan ini tidak hanya dilakukan secara simbolis saja,

akan tetapi harus tetap memastikan bahwa jalinan hubungan yang dibentuk dapat memiliki keuntungan dan terdapat tindak lanjut setelahnya (Leonard, Stead, & Conrad, 2002).

Pada praktiknya, dalam mengelola strategi diplomasi publiknya tiap negara memiliki lembaga yang berbeda-beda. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan tujuan utama yang berbeda-beda. Terdapat beberapa lembaga yang menjadi bagian dari pemerintah, akan tetapi banyak juga lembaga lain yang berdiri sendiri atau independen (Leonard, Stead, & Conrad, 2002).

### 1.5 Sintesa Pemikiran



Dari pemaparan teori diatas, sintesa pemikiran yang penulis dapat paparkan adalah diplomasi publik menurut Leonard memiliki tiga komponen yaitu *News Management (reactive)*, *Strategic Communications (Proactive)*, dan *Relationship Building*. Diplomasi publik dapat didefinisikan sebagai citra dan reputasi negara sebagai barang publik yang dapat mempengaruhi

kepentingan individu. Artinya, jika suatu negara mendapat citra positif dari masyarakat maka akan semakin banyak keuntungan yang di dapat, oleh karena itu diperlukan komponen-komponen diplomasi publik untuk dapat mengiringi proses berjalannya diplomasi publik. Komponen ini juga akan menjadi cara penulis dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah.

### **1.6 Argumen Utama**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan satu argumen utama bahwa Indonesia melakukan tiga komponen upaya untuk berdiplomasi publik dengan negara-negara anggota MSG. Adapun komponen-komponen tersebut yaitu *News Management (Reactive)*, *Strategic Communications (Proactive)*, dan *Relationship Building*. *News Management (Reactive)* menjawab bahwa Indonesia berupaya menyampaikan informasi dan data-data yang berkaitan dengan isu Papua melalui media cetak, dan media elektronik. Seperti Indonesia yang membantah adanya tuduhan bahwa jurnalis asing tidak diperbolehkan masuk ke Papua.

Kemudian, *Strategic Communications (Proactive)* menjawab bahwa Indonesia menunjukkan kepada masyarakat internasional mengenai ras melanesia di Indonesia yang tidak hanya orang Papua saja, akan tetapi terdapat juga etnis Maluku dan Timor-timor (NTT). Hal ini merupakan salah satu alasan dibukanya *Melanesian Cultural Festival*. Yang terakhir, yaitu *Relationship Building*, menjawab mengenai upaya Indonesia dalam menjalin hubungan kerja sama dengan MSG. Adapun salah satu upaya nya yaitu

dengan membuat kerja sama teknik. Kerjasama ini meliputi adanya workshop, pelatihan, dan program beasiswa yang diberikan kepada siswa dari negara-negara MSG.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif di mana penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang metodenya menggambarkan hasil penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan deskripsi dan validasi mengenai peristiwa yang diteliti (Ramdhan, 2021). Dalam menggunakan tipe penelitian ini judul yang akan diangkat harus benar-benar sesuai dalam hal ini mengandung nilai ilmiah. Tujuan menggunakan tipe penelitian ini juga tidak boleh terlalu luas dan harus menggunakan informasi faktual dan bukan opini. Penelitian deskriptif juga dapat dikaitkan dengan pengkajian peristiwa secara runtut atau dapat dikaitkan untuk mencari perbedaan peristiwa lain (Siyoto & Sodik, 2005). Penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana upaya diplomasi publik Indonesia terhadap negara-negara MSG pada tahun 2011-2016.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang, kerangka teori, dan metode penelitian yang telah dijelaskan, penulis menetapkan beberapa batasan rentang waktu dan geografis sebagai ruang lingkup penelitian. Penulisan ini berfokus pada bagaimana upaya diplomasi publik Indonesia terhadap negara-negara MSG pada tahun 2011-2016. Peneliti membatasi di tahun 2011-2016, hal ini



karena dalam enam tahun ini Indonesia banyak melakukan komunikasi dengan MSG. Hal ini Seperti di tahun 2011 Indonesia mulai bergabung dengan organisasi MSG sebagai observer atau pengamat, Indonesia juga melakukan kerja sama teknik tahun 2011-2014 dengan organisasi MSG. Tahun 2011 merupakan tahun awal dimana Indonesia melakukan komunikasi dengan MSG. Kemudian, di tahun 2015 dan 2016 Indonesia berupaya memperbaiki citranya di depan negara-negara anggota MSG. Hal ini dilakukan karena pada tahun 2014, Vanuatu sebagai negara anggota MSG meminta PBB mengirim utusan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Tentunya, keputusan Vanuatu ini mencoreng citra Indonesia. Keputusan ini juga menyebabkan banyak jurnalis asing yang masuk secara ilegal ke Papua. Oleh karena itu, Indonesia berupaya memperbaiki persepsi negara-negara anggota MSG dengan menerbitkan dua berita yang berisi penjelasan atas isu tersebut. Adapun berita tersebut diterbitkan di tahun 2015 dan 2016.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai cara peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian dari sumber data (subjek maupun sampel penelitian). Data tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan penelitian dan menguji hipotesis, data merupakan bahan yang penting dalam penelitian. Data diperoleh dari proses pengumpulan data. Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai cara penulis dalam mendapatkan data melalui narasumber dengan cara atau metode tertentu (Silalahi, 2009).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang didapatkan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data dengan tujuan menunjang data primer. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan berbagai sumber literatur dari internet yang sebanding untuk dijadikan patokan sumber alur literasi seperti berita, jurnal, beberapa artikel, dan website yang diterbitkan oleh beberapa sumber yang berkaitan dengan judul ini.

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana teknik analisis data kualitatif dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk bekerja dengan data, mengatur data, menyunting data menjadi unit-unit yang dapat diatur, mensintesis pola, mencari dan menemukan, serta menemukan bagian penting untuk dapat diceritakan kepada orang lain (Saleh, 2017). Data yang disajikan dalam penelitian kualitatif ini berupa kata-kata bukan rangkaian angka (Miles, Huberman, & Johnny, 2014). Dalam hal ini penulis ingin menggali lebih dalam mengenai bagaimana upaya diplomasi publik Indonesia kepada negara-negara MSG pada tahun 2011-2016.

#### **1.8 Sistematika Penulisan**

**BAB I** Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka acuan, sintesa pemikiran, argumen utama dan metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari jenis penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

**BAB II** menjelaskan tentang upaya diplomasi publik Indonesia ke negara-negara MSG di tahun 2011-2016 melalui *News Management* atau (*reactive*).

**BAB III** menjelaskan tentang upaya diplomasi publik Indonesia ke negara-negara MSG di tahun 2011-2016 melalui *Strategic Communications* atau (*proactive*), dan *relationship building*.

**BAB IV** berisi tentang kesimpulan dan saran.